

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Mely G. Tan (Silalahi, 2009: 28) mengatakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Selanjutnya Nazir (2003: 63) mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai berikut:

Metode deskriptif adalah suatu metode dengan meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran maupun sistem peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

A. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, fokus penelitian dan tujuan penelitian maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2008: 13) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Penelitian kualitatif harus mendasarkan pada asumsi bahwa realitas merupakan dinamika. Tugas peneliti menjangkau data secara luas, mendalam, sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yang absah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Moleong (2004), bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.”

Lebih lanjut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2004) mengemukakan lima karakteristik utama dari penelitian kualitatif, sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri sebagai instrumen utama untuk mendatangi secara langsung sumber data.
2. Menyimpulkan data yang dikumpul dalam penelitian ini lebih cenderung dalam bentuk kata-kata dari pada angka.
3. Menjelaskan bahwa hasil penelitian lebih menekankan kepada proses, tidak semata-mata kepada hasil.
4. Melalui analisis induktif peneliti mengungkapkan makna dari keadaan yang diamati.
5. Mengungkapkan makna sebagai hasil yang esensial dari pendekatan kualitatif.

Richie (Moleong, 2004) juga mengemukakan bahwa penelitian Kualitatif adalah “ Upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti”. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji fenomena-fenomena mengenai Kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi.

B. Informan dan Lokasi Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru, pengawas Provinsi, pengawas Kota, Koordinator pendidikan Inklusif Provinsi, orang tua, pendamping siswa, dan siswa yang berada di sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif. Adapun Sekolah yang di pakai dalam penelitian ini adalah Sekolah X Kota Jambi. Sekolah Dasar ini ditunjuk langsung oleh pemerintah Provinsi sebagai sekolah yang pertama dalam menyelenggarakan pendidikan Inklusif pada tahun 2004. Adapun penetapan pemilihan lokasi tersebut atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

Johandri Taufan, 2013

Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Sekolah X Kota Jambi merupakan sekolah pertama kali yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif.
2. Jumlah siswa berkebutuhan khusus di Sekolah X Kota Jambi adalah yang paling terbanyak.
3. Sekolah X Kota Jambi merupakan sekolah yang setiap tahunnya menerima siswa berkebutuhan khusus.
4. Merupakan rujukan dari pengawas sekolah dan koordinator pendidikan inklusif.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrument

1. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan data yang diambil oleh peneliti mengenai Kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi, maka peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dengan menggunakan alat pengumpulan data dan berupa pedoman observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Nasution (2009: 107) observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. Observasi sistematis di gunakan selama penelitian berlangsung untuk mencermati fenomena-fenoma di lapangan sejak tahap studi orientasi, implementasi, sampai evaluasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat Kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di sekolah X kota Jambi.

b. Wawancara

Johandri Taufan, 2013

Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Wawancara digunakan dalam rangka memperoleh data informasi verbal secara langsung dari sumber data. Wawancara yang digunakan untuk mewawancarai para key informant yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam penelitian yaitu, kepala sekolah, pengawas provinsi dan kota, koordinator inklusif di Kota Jambi, guru, orang tua, dan siswa. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara agar tidak keluar dari fokus penelitian yang telah ditentukan.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

2. Pengembangan Instrument

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan manusia sebagai instrument utama yaitu peneliti sendiri, karena instrument manusia dalam penelitian kualitatif dipandang lebih cermat dan teliti. Sebagai instrument dalam menjangkau data, peneliti juga menggunakan instrument pengumpulan data berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi.

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi

PERTANYAAN PENELITIAN	ASPEK	INDIKATOR	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	INSTRUMENT	INFORMAN
1	2	3	4	5	6
Kondisi faktual kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi	1. Penerimaan peserta didik 2. Perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan 3. Kurikulum 4. Proses Kegiatan Belajar 5. Pendanaan 6. Sarana Prasarana	1. Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus? 2. Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan? 3. Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam penyesuaian kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus? 4. Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam kegiatan belajar pada seting pendidikan inklusif? 5. Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif?	Observasi Dokumentasi	1. Pedoman observasi 2. Pedoman dokumentasi	1. Kepala sekolah 2. Guru 3. Pengawas SLB Provinsi 4. Pengawas SDLB Kota 5. Koordinator Pendidikan Inklusif 6. Orang tua

Johandri Taufan, 2013

Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

		6. Bagaimana kebijakan kepala sekolah			
1	2	3	4	5	6
		dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan inklusif?			
Peran kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala sekolah sebagai educator 2. Kepala sekolah sebagai manajer 3. Kepala sekolah sebagai administrator 4. Kepala sekolah sebagai supervisor 5. Kepala sekolah sebagai leader 6. Kepala sekolah sebagai innovator 7. Kepala sekolah sebagai motivator 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kebijakan kepala sekolah sebagai educator dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif? 2. Apa kebijakan kepala sekolah sebagai manejer dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif? 3. Apa kebijakan kepala sekolah sebagai administrator dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif? 4. Apa kebijakan kepala sekolah sebagai supervisor dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif? 5. Apa kebijakan kepala sekolah sebagai leader dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif? 	wawancara	Pedoman wawancara	Kepala sekolah

Johandri Taufan, 2013

Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

		6. Apa kebijakan kepala sekolah sebagai			
1	2	3	4	5	6
		<p>innovator dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif?</p> <p>7. Apa kebijakan kepala sekolah sebagai motivator dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif?</p>			
<p>Pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi</p>	<p>Faktor Pendukung Pengambilan Kebijakan</p> <p>Faktor Penghambat Pengambilan Kebijakan</p>	<p>1. Pemahaman kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif.</p> <p>2. Dukungan dari semua masyarakat sekolah terkait pengambilan kebijakan.</p> <p>3. Partisipasi dari semua masyarakat sekolah terhadap kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif.</p>	<p>Observasi</p> <p>Wawancara</p> <p>Dokumentasi</p>	<p>1. Pedoman observasi</p> <p>2. Pedoman dokumentasi</p> <p>3. Pedoman wawancara</p>	<p>1. Kepala sekolah</p> <p>2. Guru</p> <p>3. Siswa</p> <p>4. Orang tua</p>

Johandri Taufan, 2013

Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	2	3	4	5	6
Rancangan desain kebijakan kepala sekolah berdasarkan hasil kajian peneliti dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi	Proses Pengambilan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulasi kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. 2. Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. 3. Evaluasi kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. 	<p>Observasi</p> <p>Wawancara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman observasi 2. Pedoman wawancara 	Kepala Sekolah

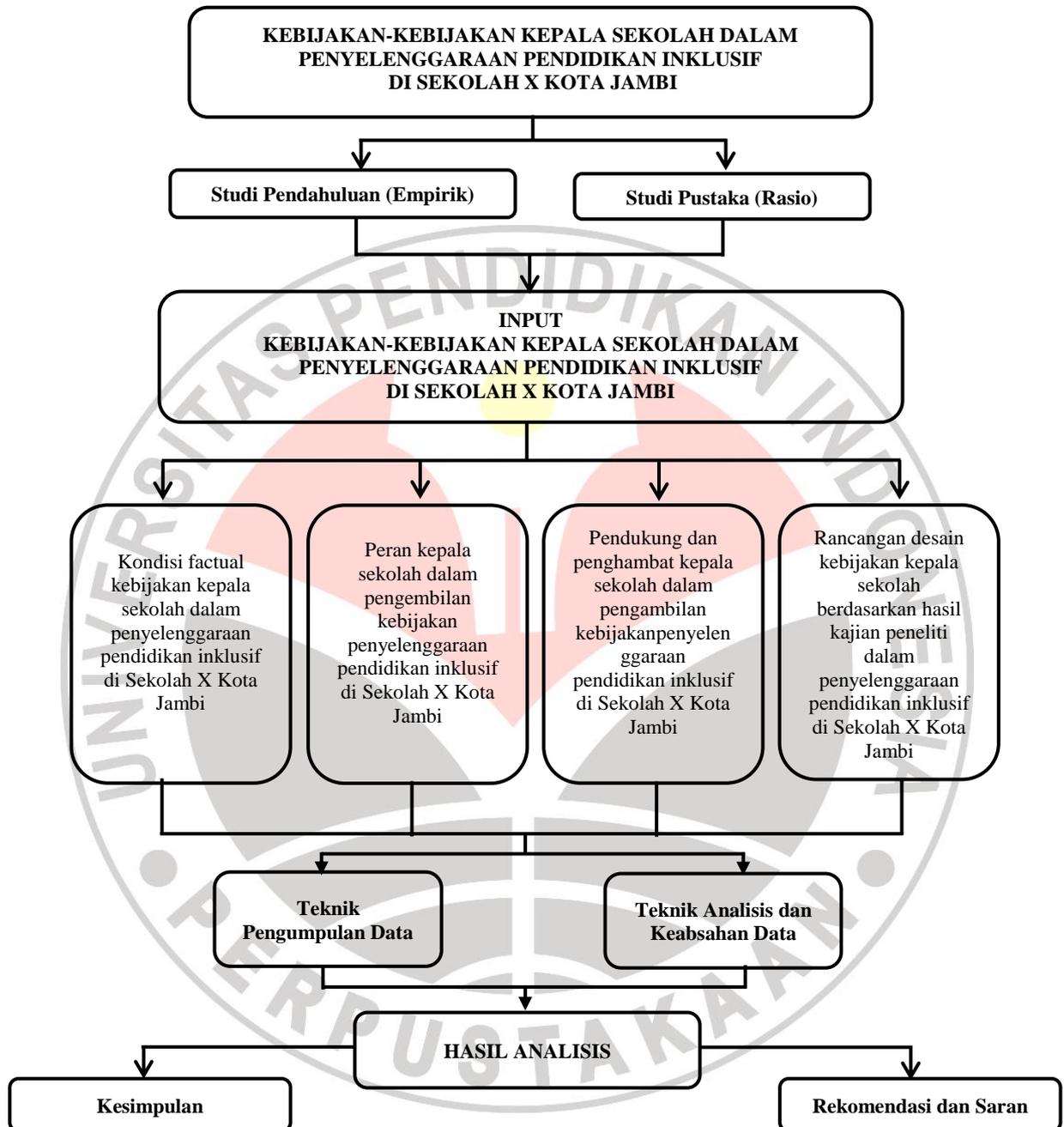
D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu (Nasution, 2009: 23). Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan.

Di mulai dengan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 30 Juni 2012 dan studi kepustakaan, peneliti mendapatkan beberapa masukan terkait Kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu obesrvasi, wawancara dan dokumentasi, maka ditemukanlah beberapa ruang lingkup dalam penelitian ini, yang selanjutnya akan dilakukan teknik keabsahan dan teknik analisis data. Dari hasil tersebut didapatkanlah hal-hal terkait mengenai kebijakan-kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang selanjutnya dibuat kesimpulan dan saran serta rekomendasi.

Untuk selanjutnya desain penelitian tersebut digambarkan pada bagan di bawah ini.

DESAIN PENELITIAN



Gambar 3.1. Desain Penelitian

E. Definisi Konsep

1. Kebijakan

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yuani, yaitu "*Policy*" yang artinya kota (*city*). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintah mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dan Hengst dalam Syafaruddin, 2008: 75).

Definisi lain dijelaskan oleh Gamage dan Pang (Syafaruddin, 2008: 75), "kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga di capai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program".

Ada tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi, dan evaluasi (Putt dan Springer, dalam Syafaruddin, 2008: 81). 1. Formulasi Kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang direncanakan. Adapun isi kebijakan mencakup: a. kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, b. jenis manfaat yang akan dihasilkan, c. derajat perubahan yang diinginkan, d. kedudukan pembuat kebijakan, e. (siapa) pelaksana program, f. sumber daya yang dikerahkan. 2. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Dwijowijoto, 2003: 158). Dijelaskan pula oleh Putt dan Springer (Syafaruddin, 2008: 86) implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi. 3. Evaluasi Kebijakan, menurut Putt dan Springer (Syafaruddin, 2008: 88) menjelaskan evaluasi adalah langkah menerima umpan balik yang utama dari proses kebijakan.

Mengacu kepada Dunn (2003) evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dengan demikian, evaluasi berkenaan dengan produksi informan mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

2. Kepala Sekolah

Sedangkan Kepala sekolah bersal dari dua kata yaitu “Kepala” dan “Sekolah” kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi secara umum kepala sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran. Wahjosumidjo (2002: 83) mengartikan bahwa: “Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Sementara Rahman dkk dalam Sri Damayanti (2008) mengungkapkan bahwa “Kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan structural (kepala sekolah) di sekolah”.

Dari penjelesan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala sekolah adalah hasil keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah untuk seseorang atau sekelompok orang untuk suatu tujuan yang diinginkan secara bersama-sama.

3. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Stainback dan Stainback (1990) mengemukakan bahwa: sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak

berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Menurut Permendiknas No 70 Tahun 2009 pasal 1 menyatakan:

Pendidikan Inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

UNESCO 1994 (Alimin; 2008), memberikan gambaran bahwa:

Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak, tanpa kecuali ada perbedaan secara fisik, intelektual, social, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa minoritas dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan *one school for all*.

Sementara menurut Juang Sunanto (2004: 3) mengemukakan pendidikan inklusif adalah:

Pendidikan yang memberikan layanan kepada setiap anak, tidak terkecuali. Tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, social, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya. Semua anak belajar bersama baik dikelas/sekolah formal maupun non formal yang berada di tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak.

Dari berbagai pendapat dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Sekolah Penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah formal yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran bersama siswa-siswa umumnya, dengan mengakomodir seluruh kebutuhan anak tanpa terkecuali.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data yang berhubungan dengan masalah seberapa jauh kebenaran dan kenetralan hasil penelitian ini diperoleh melalui beberapa kegiatan. Adapun menurut Moleong (2012) mengemukakan beberapa teknik keabsahan data yang diuraikan sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti itu sendiri sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci dan teliti terhadap faktor-faktor yang menonjol. Dengan demikian didapatkan informasi secara mendalam mengenai Kajian Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Jadi triangulasi merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu sendiri. Teknik yang dipakai melalui sumber yaitu memandingkan derajat kepercayaan dari obeservasi dan wawancara dengan subjek sendiri serta pihak terkait lainnya.

4. Analisis Kasus Negatif

Teknik analisis kasus negative dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecendrungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.

5. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

6. Mengadakan audit dengan dosen pembimbing yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan ketelitian yang dilakukan sehingga timbul keyakinan bahwa yang diperoleh adalah tepat mencapai kebenaran yang diharapkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2008) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentansi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang perlu dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Nasution (2003). Adapun analisis data yang maksud adalah

1. Reduksi Data (Penyajian Data)

Reduksi data berarti mengambil bagian pokok atau intisari dari data yang telah diperoleh yang mencakup kondisi faktual kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi, peran

kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi, pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi dan desain kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi. Data tersebut kemudian marangkum dan mencari tema atau pola dari setiap data agar mudah dipahami.

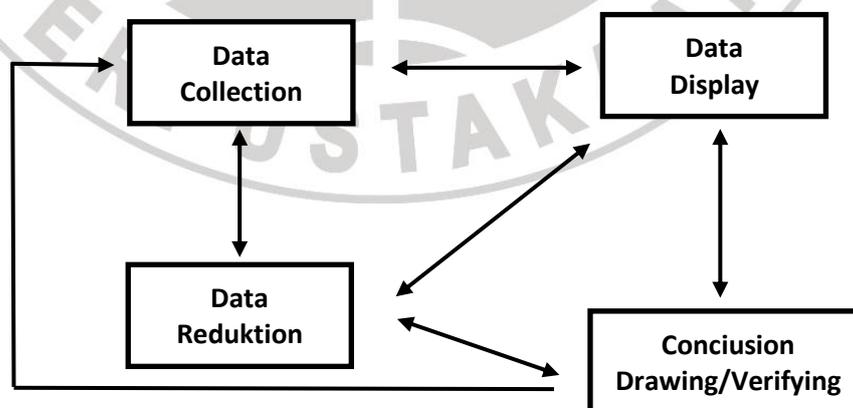
2. Display Data (Pengelompokan Data)

Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan sistematis rumusan masalah kemudian disajikan dalam deskriptif sehingga data mudah dibaca dan dipahami serta mampu menggambarkan keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Vervikasi Data (Penarikan Keseimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak dari aawal hingga akhir proses penelitian guna mempermudah peneliti untuk mendapatkan makna dari setiap dara yang dikumpulkan. Kesimpulan yang diambil senantiasa diverivikasi selama penelitian berlangsung untuk menjaga tingkat kepercayaan peneliti.

Adapun skema analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.



Gambar. 3.2. Langkah-langkah Analisis Data Kualitatif (Miles dan Huberman, 1984:16)